



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK HENRY RISTANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 224480

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.372.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/180 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 286 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 572.000.000
3. Bangunan Seluas 18.1 m2 di SLEMAN, LAINNYA Rp. 550.000.000
4. Bangunan Seluas 18.1 m2 di SLEMAN, LAINNYA Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.750.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
3. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 158.420.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 810.588.920**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 310.187.382**F. HARTA LAINNYA** Rp. 24.053.891

Sub Total Rp. 4.771.000.193

III. HUTANG Rp. 1.019.689.034**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.751.311.159



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.